

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN

#### A. Simpulan

*Political cost hypothesis* menjelaskan bahwa perusahaan besar<sup>1</sup> cenderung melakukan rekayasa laba untuk meminimalkan biaya politik. Biaya politik adalah semua biaya yang harus ditanggung perusahaan terkait dengan tindakan-tindakan politis pemerintah seperti pajak dan regulasi (Watts & Zimmerman, 1978). Tindakan politis pemerintah, seperti regulasi, subsidi dan pajak, merupakan lingkungan eksternal yang penuh dengan ketidakpastian. *Resource dependence theory* menyatakan bahwa perusahaan merupakan sebuah *open system* yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang penuh dengan ketidakpastian. Salah satu cara untuk meminimalisir ketidakpastian tersebut adalah dengan menjalin koneksi politik (Pfeffer & Salancik, 2003). Koneksi politik akan menghasilkan aktivitas *rent seeking* (Feng, Johansson, & Zhang 2014). Informasi terkait *rent seeking* ini harus disembunyikan, karena jika diketahui publik akan berdampak buruk bagi kedua belah pihak. Cara untuk menyembunyikannya adalah *accrual-based earnings management* (Braam, Nandy, Weitzel & Lodh, 2015).

Hasil pengujian hipotesis pertama mendukung premis diatas. Simpulan pertama dalam penelitian ini adalah, perusahaan dengan koneksi politik memiliki nilai *discretionary accruals* yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Hal ini dapat dimaknai bahwa perusahaan dengan koneksi politik memiliki laba yang lebih buram (*opaque*) daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik (Riahi-Belkaoui 2004). Penyebabnya adalah karena perusahaan

---

<sup>1</sup> Ukuran perusahaan merupakan proksi untuk variabel *political attention* atau sorotan politik (Watts & Zimmerman, 1978).

dengan koneksi politik menyembunyikan lebih banyak informasi daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik (Jin & Myers 2006).

Simpulan kedua penelitian ini adalah, nilai *discretionary accruals* perusahaan dengan koneksi politik tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 5, tipe 6 dan tipe 7 tidak berbeda. Artinya, apapun tipe koneksi yang dimiliki perusahaan, nilai *discretionary accruals* perusahaan yang memiliki koneksi politik tidaklah berbeda. Penulis menduga hal ini berkaitan dengan kemampuan setiap tipe koneksi politik yang hampir sama dalam memberikan kemudahan dan keuntungan kepada perusahaan. Koneksi militer memberikan fasilitas suku bunga pinjaman yang lebih murah (Harrymawan, 2016), perlindungan dan prioritas perijinan ekspor impor (Crouch, 1975). Koneksi pemerintah memberikan perusahaan pemahaman mengenai proses regulasi dalam pemerintahan, akses prioritas mendapatkan kontrak kerja Pemerintah (Featherstone 2012). Koneksi parlemen memberikan perusahaan akses mendapatkan pinjaman bank, akses informasi mengenai arah kebijakan pemerintah sehingga perusahaan dapat menyesuaikan bisnis perusahaan (Deng & Kennedy 2010; Truex, 2014). Setiap tipe koneksi politik yang ada diduga memberikan kemudahan dan keuntungan yang relatif sama kepada perusahaan. Semua yang berkaitan dengan kegiatan perburuan rente pada setiap tipe koneksi politik ini juga sama-sama harus disembunyikan (Braam, Nandy, Wietzel & Lodh, 2015), sehingga akan menghasilkan nilai *discretionary accrual* yang relatif sama pada setiap perusahaan yang memiliki koneksi politik.

Dalam periode penelitian ini, tepatnya pada Oktober 2014 telah terjadi pergantian rezim kepemimpinan di Indonesia yakni pergantian presiden, kabinet menteri serta pergantian anggota parlemen (DPR). Pergantian rezim kepemimpinan menyebabkan perubahan peta kekuatan politik. Perubahan peta kekuatan politik mempengaruhi kualitas laba akuntansi perusahaan (Leuz & Oberholzer-gee 2006;

Harymawan, Agustia, & Prasetyo 2017)) karena nilai kekuatan politik yang melekat pada politisi tertentu mempengaruhi manfaat yang dapat diberikan kepada perusahaan terkoneksi (Goldman, Rocholl & So 2008).

Perubahan kekuatan politik pada masa observasi penelitian ini diduga mempengaruhi laba akuntansi perusahaan, karena koneksi politik yang dimiliki oleh dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan pada tahun 2014 merupakan bagian dari patron rezim kekuatan politik yang lama. Belum tentu mudah bagi perusahaan untuk membangun koneksi dengan rezim kekuatan politik yang baru. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan koneksi politik yang ada tidak lagi memberikan keuntungan dan kemudahan yang sama seperti sebelum terjadinya perubahan peta kekuatan politik (kekuatan politik rezim lama versus kekuatan politik rezim baru). Dengan perbedaan (menurunnya) keuntungan dan fasilitas yang diperoleh dari koneksi politik-patron rezim lama tersebut, tentu akan memberikan nilai *discretionary accruals* yang berbeda pula.

Kesimpulan ketiga penelitian ini adalah, perusahaan dengan koneksi politik melakukan lebih banyak *accrual-based earnings management* sebelum pergantian rezim (tahun 2014) daripada setelah pergantian rezim (tahun 2015). Nilai rata-rata *discretionary accruals* perusahaan yang memiliki koneksi politik menurun pada tahun 2015 atau setelah pergantian rezim pemerintahan, menteri dan parlemen. Artinya, perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan rezim lama-tahun2014 belum mampu dan/atau membutuhkan waktu untuk membangun koneksi politik dengan rezim pemerintahan baru-tahun 2015 (Leuz & Oberholzer-Gee, 2006). Ketidakmampuan ini akan membuat manajer perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan *accrual-based earnings management* karena meningkatnya risiko

ketidakpastian eksternal (mencakup kondisi politik, pajak, dan regulasi) yang akan dihadapi perusahaan.

## B. Implikasi

Perusahaan dengan koneksi politik memiliki nilai *discretionary accrual* yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik karena harus merahasiakan segala informasi yang berkaitan dengan aktivitas perburuan rente. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki koneksi politik menghasilkan laba yang lebih buram daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Jika investor menggunakan laporan laba yang buram maka risiko ekuitas investor meningkat, karena menjadi keliru dalam mengestimasi *risk* dan *return* investasi ketika menentukan mana peluang investasi yang bagus dan mana yang buruk.

Apapun jenis koneksi politik yang dimiliki perusahaan, nilai *discretionary accrual* perusahaan lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak memiliki politik. Artinya, perusahaan dengan koneksi politik melakukan rekayasa peningkatan laba (*upward*). Investor dan semua pihak yang berkepentingan lainnya perlu lebih berhati-hati dalam membaca laporan keuangan perusahaan yang memiliki koneksi politik agar tidak salah dalam proses pengambilan keputusan investasi, keputusan proyek dan berbagai keputusan lainnya.

Laporan keuangan dengan laba buram, yang dihasilkan oleh perusahaan dengan koneksi politik memiliki kontribusi terhadap kondisi ekonomi negara. Laporan dengan laba yang buram akan membuat calon investor membebankan *opacity premium risk* yang lebih besar. Sehingga calon investor akan menetapkan *required rate of return* yang lebih besar ketika akan berinvestasi di Indonesia

ketimbang berinvestasi di negara lain yang lebih transparan<sup>2</sup>. Hal ini akan memperlambat pertumbuhan investasi asing di Indonesia yang tentu saja akan memperlambat pertumbuhan ekonomi negara.

### C. Keterbatasan Penelitian

Definisi koneksi politik yang digunakan pada penelitian ini merujuk kepada Faccio (2006) dengan modifikasi. Karena faktor keterbatasan penulis dalam perolehan data, penelitian ini tidak mencakup definisi koneksi politik: (a) jika petinggi perusahaan merupakan keluarga menteri<sup>3</sup> (b) jika salah satu petinggi perusahaan memiliki hubungan dekat<sup>4</sup> dengan politisi partai politik dan atau memiliki hubungan dekat dengan politisi negara lain. Jika poin (a) dan (b) dapat diperoleh maka mungkin akan memberikan simpulan yang berbeda.

Dalam mendeteksi koneksi politik penelitian ini hanya menggunakan data dari *annual report* emiten dan tidak menelusuri koneksi politik hingga tingkatan anak perusahaan emiten. Ada kemungkinan emiten (induk perusahaan) tidak memiliki koneksi politik namun anak perusahaan memiliki koneksi politik. Kondisi tersebut akan menyebabkan peneliti keliru dalam mengategorikan koneksi politik emiten sampel. Seandainya data koneksi politik perusahaan anak emiten dapat diperoleh, maka akan menangkap jumlah koneksi politik yang lebih banyak dan mungkin memberikan simpulan yang berbeda. Peneliti berikutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan memperhitungkan koneksi politik yang ada pada anak perusahaan sampel.

Data yang tersedia membuat penulis hanya mampu menggunakan variabel data kategorikal pada variabel koneksi politik, sementara kategorikal merupakan jenis

<sup>2</sup> Investor akan membebankan *opacity premium risk* 8,54% lebih besar ketika akan berinvestasi di Indonesia daripada berinvestasi di AS (Kurtzman 2004).

<sup>3</sup> Hubungan keluarga mencakup pasangan, anak, cucu, saudara kandung dan mertua (Faccio, 2006).

<sup>4</sup> Hubungan dekat dibuktikan dengan informasi dari media massa (Faccio, 2006)

yang terendah. Seandainya terdapat referensi dan cara untuk mengukur kekuatan dari tujuh tipe koneksi politik tersebut maka mungkin dapat memberikan hasil yang berbeda. Peneliti berikutnya dapat melanjutkan penelitian dengan meningkatkan data tipe koneksi politik menjadi ordinal.

